

**IMPLEMENTASI STRATEGI KEBIJAKAN RETRIBUS PASAR
DI KABUPATEN LUWU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH :
ISMA BAKRI
10538293114

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

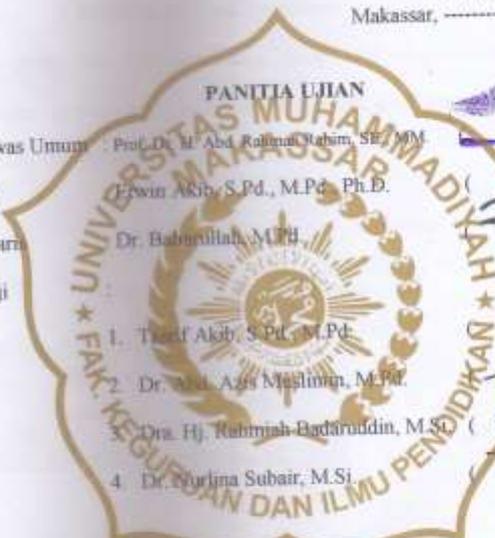
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Isma Bakri**, NIM 10538 2931 14 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0014 Tahun 1440 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari tanggal 1 Februari 2019.

24 Jumadil Awal 1440 H
Makassar, _____
30 Januari 2019 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. M. Abd. Rahman Sahim, S.Pd., M.Pd.
Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Bahriyallah, M.Pd.
Penguji :
1. Tazaf Akib, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. M. Azziz Maslimum, M.Pd.
3. Dra. Hj. Rahmah Badaruddin, M.Si
4. Dr. Nurjina Subair, M.Si



Handwritten signatures and initials are present next to the names of the members of the examination committee.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Strategi Kebijakan Retribusi pasar di kabupaten Luwu

Nama : Isma Bakri

NIM : 10538 2931 14

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim pengajar skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

14 Jumadil Awal 1440 H
Makassar, 30 Januari 2019 M

Disahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., M.M

Dra. Hj. Rahmah Badaruddin, M.Si

Mengetahui

Dekan EKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (HR. Muslim)

Jangan merasa kehilangan semangat dalam menjalani hidup yang mampu membuat semangatmu meredup karena tak semua hal berjalan sesuai rencanamu.

Kupersembahkan karya ini kepada :

Ibunda dan Ayahanda, serta saudara-saudaraku yang telah memperjuangkan segalanya untukku. Karya ini akan menuntunku menuju kesuksesan meski harus ku tempuh hiruk pikuk kehidupan dan badai yang akan menghalangi.

ABSTRAK

Isma Bakri. 2018. Implementasi Strategi Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Abd. Rahman Rahim dan Pembimbing II Hj. Rahmiah.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Strategi Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan . Implementasi Strategi Kebijakan Retribusi Pasar Di Kabupaten Luwu Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi strategi kebijakan retribusi pasar di kabupaten Luwu adalah pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu melalui penerapan kebijakan retribusi pasar, peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu juga merupakan fungsionalisme melihat individu sebagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar yang berkontribusi untuk menciptakan stabilitas sosial di Kabupaten Luwu.

Kata Kunci : *Implementasi dan Kebijakan Retribusi*

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbi'l'alamin atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga Penulis dapat menyelesaikan Proposal ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikan proposai ini. Penulis menyadari bahwa sejak penyusunan proposal sampai proposal ini rampung, banyak hambatan, rintangan, dan halangan. Namun berkat bantuan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan pada proposal ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk kedua orang tua penulis. Untuk Ibu dan Ayah yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S. E. MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd. Ph.D Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. H. Nurdin, M.Pd Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S. E. MM. selaku Pembimbing I, atas segala bimbingan, arahan, waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis sehingga proposal ini dapat diselesaikan dan semoga segala bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.
5. Dra. Hj. Rahmiah B., M.Si. selaku Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis sehingga proposal ini dapat diselesaikan dan semoga segala bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menyalurkan ilmunya secara ikhlas dalam mendidik penulis..
7. Sahabat-Sahabatku serta teman-teman yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi, membantu serta siap menemaniku dalam suka maupun duka, pertengkaran kecil penuh canda dan tawa yang selalu mewarnai kebersamaan kita selama perkuliahan akan selalu aku rindukan. Semoga persahabatan dan persaudaraan kita tetap abadi selamanya.
8. Rekan-Rekan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar..

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
SURAT PERJANJIAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Depenisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Konsep	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29

B. Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian	29
D. Fokus penelitian	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Jenis dan Sumber Data	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Teknik Analisis Data	34
I. Teknik Keabsahan Data	35

BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Luwu	37
----------------------------------------------	----

BAB V IMPLEMENTASI STRATEGI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN LUWU

A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	48

BAB VI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN LUWU

A. Hasil penelitian	52
B. Pembahasan.....	58

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan potensi lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945), yang juga merupakan visi dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam rangka peningkatan pembangunan daerah ini, sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting. Selain sumber daya manusia, factor-faktor yang lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah yaitu tersedianya keuangan yang memadai baik yang bersumber dari subsidi pusat atau daerah yang digali dari pendapatan asli daerah itu sendiri (PADS) seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya.

Suatu daerah di bentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (sebagai mana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004) yaitu: “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil gunanya penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran masyarakat juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan sumber PAD yang potensial karena lingkup pengenaan retribusi daerah lebih luas di banding dengan pajak daerah. Pengembangan retribusi daerah lebih mudah di bandingkan dengan pajak daerah mengingat lingkup pengenaan retribusi daerah tidak seketat dibandingkan dengan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan PAD lebih banyak tertuju pada upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah.

Di Kabupaten Luwu, retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap

PAD, sehingga pemerintah daerah terus membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang terus dikembangkan adalah retribusi pasar, karena di daerah ini terdapat 14 (empat belas) pasar tradisional yang terletak dipusat-pusat kecamatan.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini tidak terlepas dari mekanisme system pemerintah daerah yaitu kerja sama antar kepala daerah dan dewan perwakilan daerah dengan cara pendapatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, subsector retribusi pasar merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup berarti di mana kontribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah, yang juga dapat menentukan arah perkembangan dan pembangunan suatu daerah kedepannya. Sehubungan dengan itu perlu digali dan diperluas

pengelolaannya sebagai mana retribusi pasar ini di pugnut atas balas saja yang disediakan pemerintah daerah.

Perbincangan mengenai otonomi daerah dalam system pemerintahan daerah di Indonesia tetap mendapatkan perhatian yang serius dan hingga sekarang menarik untuk didiskusikan. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 6 tentang Keuangan Daerah (2004:221) disebutkan:

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”. Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di kabupaten Luwu adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Untuk mencapai tujuan diatas maka keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam oprasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar. Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pegelolaan retribusi pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui kelemahannya yang dihadapi dalam pemungutan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan. Berbagai kekurangan-kekurangan dapat diatasi melalui pengawasannya secara langsung maupun tidak langsung.

Peran administrator pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan rumah tangga daerah, dalam bidang pendapatan daerah, khususnya pengelolaan retribusi pasar merupakan bagian yang penting sehingga perlu menjadi perhatian. Untuk itu yang berkaitan dengan faktor- faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu diperhatikan agar dapat dibenahi ataupun ditingkatkan keberadaannya. Kondisi ini dapat berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin petugas, kemampuan aparatur, serta kesadaran masyarakat pedagang serta kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini berpengaruh pada peningkatan penerimaan retribusi dari sektor pasar.

Dengan turut berperannya pemerintah daerah hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam peningkatan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar maka dapat memberikan sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang turut mendukung pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini, penulis memilih salah satu pasar yang dianggap dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu yaitu, Pasar Sentral Belopa. Pasar tersebut merupakan pasar tradisional Kabupaten Luwu yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas ekonomi, sehingga dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi daerah.

Kehadiran pasar tersebut diharapkan dapat merumuskan formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana/prasarana perpasaran, serta diharapkan juga dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi pasar tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemungutan retribusi pasar tersebut sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu tidak merata.

Penulis tertarik mengangkat tema Implementasi Strategi Kebijakan Retribusi Pasar karena melihat proporsi dari kebijakan retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kabupaten Luwu. Selain itu, alasan penulis mengambil tema Implementasi Strategi Kebijakan Retribusi Pasar Kabupaten Luwu dalam objek penelitian adalah ingin mengetahui seberapa besar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mengelola pemungutan retribusi Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Strategi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam peneliti ini agar peneliti memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasi fakta dan data ke dalam penulisan proposal, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi strategi kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi strategi kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat mengetahui ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil pengamatan langsung serta dapat memahami disiplin ilmu yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi khususnya bidang ilmu pendidikan social.
 - b. Dengan demikian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan penilaian ini diharapkan dapat memberi sumbangan untuk mengembangkan teori penelitian pendidikan sosiologi pada umumnya.
 - c. Dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penelitian selanjutnya dalam study Implementasi kebijakan retribusi pasar di kabupaten Luwu yang dapat memberikan kontribusi pada aspek pelayanan public pasca retribusi pasar di kabupaten Luwu.
2. Manfaat Praktis

- a. Dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberi manfaat baik para teoritis, praktis untuk lebih meningkatkan perhatian masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.
- b. Bagi masyarakat, yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap kebijakan pemerintah dalam membangun kabupaten Luwu.

E. Defenisi Operasional

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kekaburan.

1. Implementasi adalah suatu hal yang bermuarah pada aksi, aktifitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu system. Implementasi tidak hanya sekedar aktifitas monoton belaka tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki teman, mengidentifikasi factor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.
3. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan

cara bertindak. Istilah ini dapat di terapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sector swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

4. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
5. Pasar adalah suatu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi yakni dengan menjual ataupun membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan beragam factor produksi lainnya. Pasar yang dibahas di sini lebih menitik beratkan kepada arti ekonomi yakni untuk transaksi jual dan juga beli.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Hasil Penelitian yang relevan

Dalam kajian pustaka atau peneliti terdahulu berujuan untuk menjelaskan hasil bacaan terhadap literature (buku ilmiah dan hasil penelitin) yang beraitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Untuk peneitian lapangan, kajjian pustaka bertujuan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti belum pernahditeliti oleh peneliti lainnya, dan pokok masalah yang akan ditliti mempunyai hubungan dengan sejumlah teori yang telah ada.

Berdasarkan penelusuran data pustaka, ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan mengambil objek penelitian sejenis, yaitu:

- a. Nurlia Hamzah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul ” Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidendreng Rappang, Sulawesi Selatan ” Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem penerimaan retribusi pasar menggunakan sistem official assesment, yaitu pemungutan langsung menggunakan benda berharga atau karcis yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Subdinas Pasar. Pelaksanaan Retribusi Pasar pada tiga tahun terakhir berjalan cukup baik, Sedangkan kontribusi

retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata sebesar 17,19%.

- b. Ulfa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul jurnal Menejemen retribusi Pasar Sentral Bulukumba Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan” Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka peningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya berasal dari Retribusi Pasar Sentral yang dianggap potensial untuk Meningkatkan pendapatan asli Daerah. Namun retribusi tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini, antara target dan realisasi anggaran dari penerimaan retribusi pasar sentral belum mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Kab.Bulukumba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen retribusi pasar sentral Kabupaten Bulukumba, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, actuating, dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas Pengelola Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dilapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, tulisan serta hasil

penelitian mengenai Manajemen Retribusi Pasar dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen retribusi pasar sentral Kabupaten Bulukumba dilihat dari segi teori, sudah baik, namun dalam kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan teori, masih ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang terkait, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan peningkatan pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar sentral.

Peneliti diatas membahas tentang aspek peninngkatan pendapatan asli daerah, maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang implementasi strategi kebijakan retribusi pasar Kabupaten Luwu

2. Implementasi Strategi

Proses manajemen strategis tidak begitu saja berakhir saat perusahaan memutuskan strategi apa yang ingin di ambil. Manajer dan karyawan suatu perusahaan harus mengerti bisnis tersebut, merasa menjadi bagian dari perusahaan dan melalui keterlibatan dalam formulasi strategi menjadi komitmen membantu organisasi mencapai kesuksesan. Implementasi strategi mempengaruhi organisasi dari atas ke bawah; ia mempengaruhi semua area fungsional dan divisional dari suatu bisnis.

Formulasi strategi dan implementasi dapat dibedakan berdasarkan hal- hal berikut ini: Perumusan strategi adalah memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan; implementasi strategi adalah mengelola kekuatan yang mengelola semua hal selama tindakan dijalankan; Perumusan strategi berfokus pada efektivitas; Implementasi strategi berfokus pada efisiensi; Perumusan strategi terutama adalah proses intelektual; Implementasi strategi terutama adalah proses

operasional; Perumusan strategi membutuhkan keahlian intuitif dan analisis yang baik; Implementasi strategi membutuhkan motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan; Perumusan strategi membutuhkan koordinasi di antara beberapa individu; Implementasi strategi membutuhkan koordinasi di antara banyak individu.

Implementasi strategis adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan strategis. Untuk memulai proses implementasi. Dibutuhkan berbagai macam cara untuk membantu proses implementasi suatu perusahaan yang tercakup dalam isu-isu manajemen.

Isu-isu manajemen seputar implementasi strategi meliputi menyusun tujuan tahunan, membuat kebijakan, mengalokasikan sumber daya, mengubah struktur organisasi yang ada, restrukturisasi dan desain ulang, merevisi rencana insentif dan pemberian imbalan pada karyawan, meminimalkan resistensi terhadap perubahan, menyelaraskan manajer dengan strategi, mengembangkan budaya yang mendukung strategi, mengadaptasikan proses produksi atau operasi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif dan, jika perlu, melakukan penyusutan ukuran perusahaan. Perubahan manajemen menjadi lebih ekstensif saat strategi baru yang akan diimplementasikan mengarahkan perusahaan ke arah yang baru. Perusahaan perlu mengembangkan strategi yang fokus pada semua tingkat hierarki dengan mengumpulkan dan menyebarkan intelijen persaingan; setiap karyawan harus bisa melakukan benchmark atas kinerjanya terhadap karyawan pesaing yang terbaik sehingga persaingan menjadi

bersifat personal. Sehingga dapat menghasilkan sinergi yang baik untuk perusahaan untuk keberhasilan proses implementasi itu sendiri.

Membuat tujuan tahunan adalah aktivitas yang terdesentralisasi yang melibatkan seluruh manajer yang ada di organisasi secara langsung. Tujuan tahunan (annual objectives) sangat esensial bagi implementasi strategi karena mereka menunjukkan dasar pengalokasian sumber daya; merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi para manajer; merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan dalam mencapai tujuan jangka panjang; dan membuat prioritas divisional dan departemental dalam organisasi.

Tujuan dibuat adalah untuk membuat strategi dapat dilaksanakan dalam tindakan (action-allowed). Setelah semua program tujuan yang dibutuhkan disusun, saatnya untuk membuat anggaran untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Proses mendesain dan menyusun anggaran program, divisional maupun perusahaan akan mengarahkan pihak manajemen untuk mengembangkan prosedur standar operasi (standard operating procedurs/ SOP), yang berisi rincian berbagai aktivitas yang diperlukan dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama tahunan merupakan panduan bagi tindakan, arahan dan penyaluran usaha dan aktivitas dari anggota organisasi. Tujuan tahunan memberikan sumber legitimasi dalam perusahaan sebagai alat justifikasi didepan pemilik kepentingan (stakeholder). Tujuan tahunan merupakan standar kinerja. Tujuan tahunan merupakan sumber penting dari motivasi dan identifikasi karyawan. Tujuan tahunan memberikan insentif bagi manajer dan karyawan atas kinerja mereka. Tujuan tahunan memberikan dasar bagi desain organisasi. Tujuan

jangka pendek adalah hasil terukur yang dapat dicapai atau dimaksudkan untuk dicapai dalam waktu satu tahun atau kurang. Tujuan jangka pendek merupakan hasil yang spesifik, biasanya kuantitatif, yang ditetapkan oleh manajer operasional untuk dicapai dalam waktu dekat. Tujuan jangka pendek membantu dalam implementasi strategi dalam tiga cara:

- a. Tujuan jangka pendek “mengoperasionalkan” tujuan jangka panjang
- b. Pembahasan mengenai dan kesepakatan atas tujuan-tujuan jangka pendek membantu mengangkat masalah dalam suatu organisasi yang memerlukan koordinasi untuk menghindari konsekuensi difungsional.
- c. Tujuan jangka pendek membantu implementasi strategi dengan mengidentifikasi hasil-hasil terukur dari rencana tindakan atau aktivitas fungsional, yang dapat digunakan bahan evaluasi.

3. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat di terapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sector swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang di inginkan

Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternative seperti

prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat di artikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative untuk mencapai untuk mencapai tujuan.

4. Konsep Retribusi Pasar

Dari beberapa pendapatan asli daerah, retribusi merupakan salah satu pendapatan terpenting di samping pajak. Salah satu retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah adalah retribusi pasar. Menurut Poerwa darminta (2001 : 953) yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan berupa uang oleh pemerintah sebagai balas jasa. Sedangkan pengertian dari pasar merupakan suatu unit usaha yang mempunyai peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian, pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah (Sugianto, 2008 : 46).

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa: “Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya”(Perda No.3 Tahun 2001).

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, adalah: “Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”(Perda No. 3 Tahun 2001). Menurut Kesit Bambang, (2005:135) pengertian Retribusi Pasar adalah Retribusi atas fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah pasar.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis Retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:

- a. Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, front Toko, dan Pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- b. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.

c. Keramaian pasar. Biaya balik nama pemakai. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan mamfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik. (Suandy, 2002:269 dalam Maryani skripsi,2004:35).

Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai, maka

keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan antara lain:

- a. Wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m,
- b. Obyek retribusi adalah pemakaian tempat-tempat berjualan, sedangkan subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah,
- c. Penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan. Apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif retribusi perlu di evaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi,
- d. Retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan,
- e. Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi,
- f. Perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta diterapkan sistem denda (Kesit Bambang, 2005:135).

5. Teori Administrasi Publik

Menurut Kerlinger dalam Pasolong (2011:9) teori adalah serangkaian konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sedangkan menurut Pasolong (2011 : 10) teori adalah pernyataan atau konsep yang teruji kebenarannya melalui riset.

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu *ad* dan *ministrare* yang berarti *to serve* yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008 : 2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie dkk dalam Pasolong, 2011 :6).

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan

sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4)

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen. Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

1. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
2. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan dengan baik.
3. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.
4. Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.

5. Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana.
6. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
7. Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
8. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
9. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar.
10. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.
11. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.
12. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan.
13. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
14. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

B. Kerangka Konsep

Ada beberapa hal pokok yang di jadikan landasan berfikir dalam penelitian ini untuk lebih memperjelas masalah dan topik pembahasan nantinya, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Implementasi diartikan sebagai kebijaksanaan-kebijaksanaan dimana pelaksanaan adalah perihal atau perbuatan usaha. Hal lain yang penting yakni latar belakang kecenderungan untuk mengkaji secara mendalam mengenai implementasi adalah pengalaman mengenai perencanaan pembangunan di negara-negara berkembang yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Implementasi kebijakan atau kebijaksanaan dapat juga di katakan implementasi pembangunan atau implementasi program pembangunan. Lebih jauh tentang pengertian implementasi sebagai proses.

Sedangkan mengenai pelaksana kebijakan/kebijaksanaan akan berjalan dengan baik apabila mengetahui bagaimana peliknya perumusan suatu kebijaksanaan dengan implementasinya. Dengan demikian pada umumnya dianggap cukup masuk akal kalau di dalam suatu kebijakan/kebijaksanaan sudah termasuk tujuan atau sasaran tertentu yang telah di tetapkan jauh dari sebelumnya walaupun tujuan dari suatu kebijaksanaan itu adalah prakteknya mungkin saja berubah atau di lupakan paling tidak sebagian begitu waktu berlalu, oleh karena itu dalam pengertian seperti ini cukup masuk akal pula bahkan dapat sebagai suatu kebenaran kalau misalnya orang mengatakan kebijaksanaan itu tidak mempunyai tujuan sama sekali sebagai sesuatu yang kontraktif.

Dalam pembuatan keputusan atau kebijaksanaan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana, setiap administrator dituntut memiliki

kemampuan atau keahlian, tanggung jawab dan kemauan, sehingga dia dapat membuat kebijaksanaan dengan segala resikonya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Sekalipun demikian dalam praktek kita melihat kadang-kalah tujuan itu dirumuskan dengan mengacu pada masa lampau sebagai suatu upaya untuk memberikan kesan kuat akan adanya suatu strategi yang jelas atau untuk memperbesar tingkat wawasan kedepan mengenai hasil akhir yang ingin dicapai daripada sebagai suatu tindakan yang sudah ditetapkan semenjak dini dalam tahap-tahap proses pembuatan kebijaksanaan.

Retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, karena retribusi daerah merupakan salah satu dari keempat jenis sumber pendapatan daerah, dimana menurut Undang-Undang Nomor.33 Pasal 6 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Dari kutipan tersebut diatas terbukti bahwa retribusi daerah adalah merupakan bagian dari pada pendapatan asli daerah. Sedangkan retribusi pasar tergolong dalam satu jenis retribusi daerah Untuk menciptakan sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar secara maksimum tentunya diperlukan adanya suatu cara pengelolaan yang lebih baik sehingga penerimaan di sektor retribusi pasar tersebut betul-betul dapat diharapkan sebagaimana mestinya.

Atau dengan kata lain dalam pemungutan retribusi pasar, pemerintah tidak terbentur pada masalah-masalah yang dapat menghambat laju peningkatan retribusi pasar tersebut. Dalam rangka pembiayaan pembangunan di Kabupaten Luwu, maka diperlukan adanya sumber-sumber pembiayaan memadai. Sumber pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dihasilkan dari pendapatan asli daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang seperti yang telah dijelaskan diatas yang menekankan bahwa dengan undang-undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah. Sebagaimana retribusi pasar yang merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah merupakan suatu pungutan sebagai sumber pembiayaan jasa pasar yang oleh Negara diberikan kepada yang berkepentingan, maka untuk dapat memberikan penerimaan yang potensial bagi daerah diperlukan pengelolaan dengan baik dalam hal ini cara pelaksana pemungutan dan pengawasan yang di tujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keberhasilan implentasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam buku Subarsono (2006;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

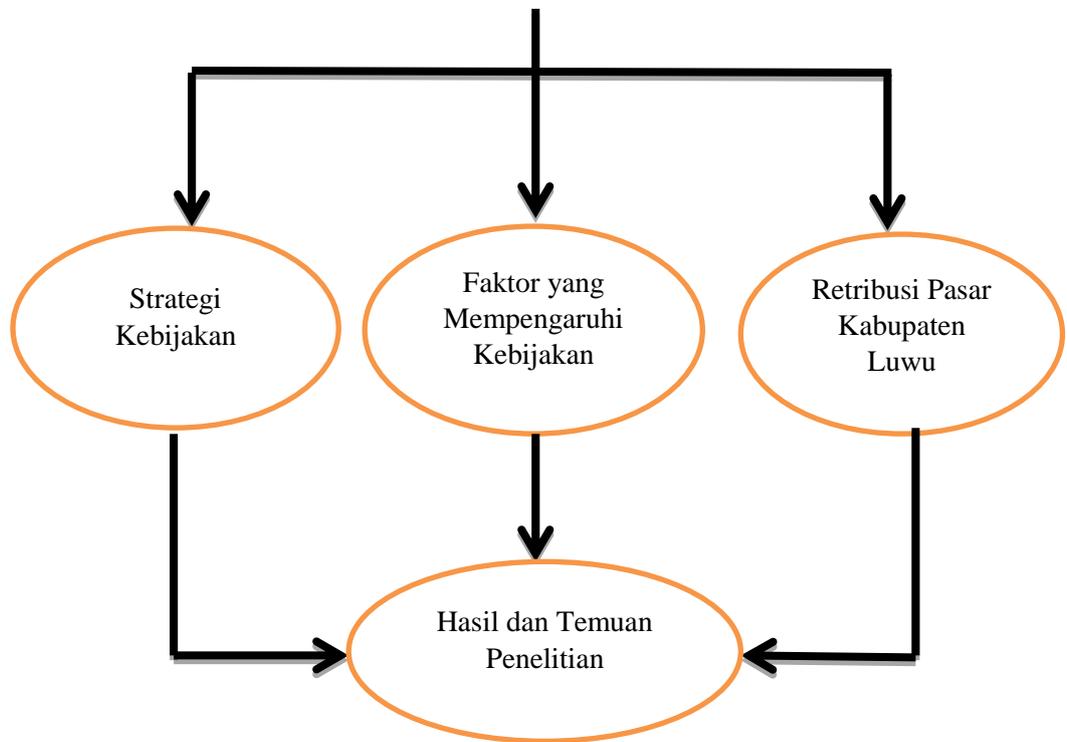
d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Dengan adanya pengelolaan retribusi pasar yang dirumuskan dalam cara pelaksanaan pemungutan dan pengawasan di upayakan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini target yang ditetapkan dapat terealisasi.

Bagan Kerangka Konsep





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

(Bungin, 2009:68). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan format desain bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi dan fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat,

(Soerjono, 2012:43). Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah memberikan gambaran tentang pengelolaan dan implementasi kebijakan retribusi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan guna memperoleh data adalah pasar sentral Belopa, Kecamatan Belopa, pasar tersebut sangat ramai di kunjungi masyarakat dan fasilitas yang dimiliki sudah cukup memadai.

C. Informan Penelitian

Peneliti mengenai implementasi kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang di maksud adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Kepala seksi retribusi PAD | 1 Orang |
| 2. Kepala dinas perdagangan | 1 Orang |
| 3. Bendahara dinas perdagangan | 1 Orang |

4. Kepala pasar belopa	1 Orang
5. Petugas penagih/kolekor	2 Orang
6. Pedagang Pasar	<u>3 Orang</u>
Jumlah	9 Orang

D. Fokus Penelitian

Spradley dalam Sugiyono (2013:286) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa yang terkait dari situasi sosial. Dengan demikian penentuan focus penelitian dalam proposal lebih di dasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Adapun Menurut Spradley dalam Prastowo (2014:137) mengemukakan bahwa ada empat alternatif untuk menetapkan focus penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Menetapkan focus pada permasalahan yang didasarkan oleh informan
2. Menetapkan focus berdasarkan domain-domain *organizing domain*
3. Menetapkan focus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek
4. Menetapkan focus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang ada.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi focus atau titik perhatian dalam penelitian ini adalah implementasi strategi kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di kabupaten Luwu.

E. Instrumen Penelitian

Afrizal (2014: 134) instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, alat atau instrument utama pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. Dalam hal ini, pewawancara sendiri yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kuantitatif alat dalam pengumpulan data dan mengacu kepada hal yang diperlukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, biasanya di pakai untuk menyebut kusioner.

Pada penelitian ini, penulis sendiri yang bertindak sebagai instrument (*human instrument*). Hal ini didasari oleh adanya potensi manusia yang memiliki sifat dinamis dan kemampuan untuk mengamati, menilai, memutuskan dan menyimpulkan secara obyektif.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang cermat dan valid serta memudahkan penelitian maka perlu menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara (daftar pertanyaan), pedoman observasi, dan hp sebagai alat untuk mengambil dokumentasi dan sebagai alat perekam. Peneliti yang berfungsi sebagai alat pengumpulan data serta pemotret.

F. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai proposal ini, baik peneliti lapangan maupun penelitian kepustakaan, dapat menghasilkan data yang digolongkan kedalam dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan bahan dan informan dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen , catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi serta bahan pustaka yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif para ilmuwan hanya dapat bekerja dengan menggunakan data, fakta dari dunia kenyataan yang diperoleh melalui penelitian. Data adalah penunjang yang penting dalam sebuah penelitian. Semakin banyak data yang diperoleh maka semakin bagus pula hasil akhir dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, untuk lebih memahami teknik-teknik pengumpulan data kualitatif tersebut, maka kita harus memahami terlebih dahulu teknik-teknik tersebut.

Dengan mempertimbangkan persoalan tersebut, akan dijelaskan apa dan bagaimana cara penggunaan teknik tersebut secara singkat sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung mengenai fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi memungkinkan melihat dan

mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Observasi ini dilakukan dengan cara, peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan pengamatan dan pencatatan tentang fenomena-fenomena yang diteliti dilokasi penelitian, yaitu di Kabupaten Luwu yang dilakukan berulang-ulang secara informal sehingga mampu mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun objek penelitian yang akan diobservasi menurut Spradley (Sugiyono, 2013:229) dinamakan situasi sosial, yang terdiri dari tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas) yang memberikan informasi dan pandangan yang benar-benar berguna dan sesuai dengan masalah penelitian.

2. Wawancara

Sugiyono (2013:231) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari informan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan merujuk pada pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis agar data yang ingin diperoleh lebih lengkap dan valid. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung bertatap muka dengan informan yang ditinjau oleh pedoman wawancara. Antara observasi dan wawancara bisa dilakukan secara bersamaan artinya sambil melakukan observasi juga bisa melakukan wawancara terhadap

informan penelitian untuk mendapatkan data yang lebih mendalam sehingga apa yang terjadi dilapangan sesuai dengan apa yang diperoleh sebagai hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2013:240), dokumentasi yaitu proses pengambilan data dengan melihat dokumen-dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara, karena dokumentasi dilakukan pada saat melakukan observasi dan wawancara terhadap informan penelitian berlangsung dilapangan.

H. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2013:334), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:337-345) mencakup tiga kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan

mencarinya bila diperlukan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik network (jejaring kerja), dan bagan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tindakan yang dilakukan setelah pengumpulan data berakhir adalah penarikan kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

I. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Menurut Sugiyono (2013:368-375) untuk menguji kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Triangulasi: yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga jenis triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.
2. Menggunakan bahan referensi: yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara perlu

didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data interaksi manusia atau suatu keadaan perlu didukung oleh gambar.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Luwu

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten luwu merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah administratif provinsi Sulawesi selatan. Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah akibat pemekaran kota palopo yaitu kabupaten Luwu bagian utara yang terletak di sebelah selatan kota Palopo dan wilayah kabupaten Luwu memiliki luas wilayah sekitar $3.000,25 \text{ km}^2$ atau 3.000.25 Ha dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 350,218 jiwa pada tahun 2015, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya bergerak pada sektor pertanian dan perikanan. Secara umum karakteristik bentang alam Kabupaten Luwu terdiri atas kawasan pesisir/pantai dan daratan hingga daerah pegunungan yang berbukit hingga terjal, dimana berbatasan langsung dengan perairan teluk Bone dengan panjang garis pantai sekitar 116, 161 km (RTRW Kabupaten Luwu).

Ditinjau dari segi geografis, kabupaten Luwu terletak di bagian utara provinsi Sulawesi Selatan, dimana posisi Kabupaten Luwu terletak $2^{\circ} 3'' .45''$.- $3^{\circ} .37' .30''$ LS dan $119^{\circ} 41' .15''$ - $121^{\circ} .43' .11''$ BT.

Secara administratif, Kabupaten Luwu memiliki batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo

- b. Sebelah Timur :Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan :Kota Palopo dan Kabupaten Wajo
- d. Sebelah Barat :Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Enrekang

Secara administratif wilayah tersebut terdiri dari 22 kecamatan yang terbagi dalam 227 desa/kelurahan dimana ibu kota kabupaten adalah kota Belopa (terdiri dari kecamatan Belopa dan kecamatan Belopa Utara). Kecamatan latimojong merupakan kecamatan yang terluas jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya dikabupaten Luwu dengan luas 3000,25 km² atau 100% sedangkan wilayah kecamatan dengan luas yang paling kecil adalah kecamatan lamasi dengan luas 42,20 km² atau 1,41%. Perbandingan luas wilayah dan banyaknya kecamatan di Kabupaten Luwu. Sedangkan dari aspek fisik dasar wilayah kabupaten Luwu meliputi kondisi topografi atau kemiringan lereng, aspek klimatologi atau kondisi iklim dan curah hujan, dan aspek penggunaan lahan.

2. Aspek Topografis

Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu memiliki tingkat kemiringan di atas 40% dengan luas wilayah sekitar 197,690,77 Ha atau 65,89% dari luas wilayah Kabupaten Luwu, sedangkan wilayah dengan kemiringan 0-8% dengan luas 42,094,88 Ha atau 14,03% kemiringan 8-15% memiliki luas 29.696,28 Ha atau 9,90% kemiringan 15-25% memiliki luas 8,245,50 Ha atau 2,75% dan 25-40% memiliki luas 22,297,60 Ha atau 7,43%. Secara umum, Kabupaten Luwu berada pada ketinggian berkisar antara 0-2000 mdpl.

3. Aspek Klimatologi (iklim dan cuaca)

Secara umum, keadaan cuaca di Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Luwu memiliki keadaan iklim tipe B1, dengan suhu rata-rata 29° – 31°c yang merupakan tipe umum di daerah tropis, sedangkan jika ditinjau dari intensitas hujan, maka curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan juli dengan nilai 756 mm di Belopa dan intensitas terendah terjadi pada bulan oktober di Kecamatan Bua dengan intensitas 6 mm, sementara itu, intensitas hujan tinggi yang merata tiap bulannya di kecamatan Bessesang Tempe dengan rata-rata 499 mm.

4. Aspek Penggunaan Lahan

Pola pemanfaatan lahan dan potensi lahan dalam suatu wilayah akan sangat mempengaruhi pola kegiatan masyarakat. Terkhusus di Kabupaten Luwu yang memiliki pola pemanfaatan lahan yang beraneka ragam karena terdiri dari daratan dan lautan. Secara umum, pola penggunaan lahan di kabupaten luwu terdiri dari hutan, permukiman, tegalan atau kebun, perkebunan, sawah, semak, tambak, dan lading. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2** berikut ini.

Tabel 4.1

Pola Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Luwu Tahun 2015

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Hutan	111.953,5	38,03
2.	Permukiman	4792,9	1,63

3.	Tegal/kebun	46.675,9	15,86
4.	Perkebunan	75.810,6	25,75
5.	Sawah	4.692,5	1,59
6.	Semak	21.458,8	7,29
7.	Tambak	22.944,2	7,79
8.	Ladang	6.057,6	2,06

Sember :Kab Luwu Tahun 2015

5. Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Luwu diketahui bahwa rata-rata pertambahan penduduk dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2015 sebanyak 3.918 jiwa per-tahun. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,04 persen, dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya sebesar 335.828 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 4.2**

Tabel 4.2

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Perkembangan jiwa	%
----	-------	---------------------------	----------------------	---

1.	2011	335.828	3400	1.010
2.	2012	338.609	4024	1.013
3.	2013	343.793	3951	1.012
4.	2014	347.096	4248	1.013
5.	2015	350.218		

Sumber :Kabupaten Luwu dalam angka 2016

Secara umum, jumlah penduduk terbesar pada tahun 2015 terdapat di kecamatan Bua sebanyak 34.424 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Latimojong sebesar 5,549 jiwa, selengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.3**

Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Dirinci Perkecamatan Tahun 2012 – 2015

No	Kecamatan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1.	Larompong	19.179	19.522	19.948	20.144
2.	Larompong selatan	16,091	16.402	15,927	16.004
3.	Suli	18.820	19,148	18,737	18,838
4.	Suli barat	8, 647	8,771	8, 944	9,027

5.	Belopa	15,086	15, 346	16, 606	16,864
6.	Kamanre	11, 446	11, 627	11, 586	11, 668
7.	Belopa Utara	14, 814	15,051	16, 189	16,428
8.	Bajo	14,501	14,715	15, 321	15,496
9.	Bajo barat	94,96	9, 657	10, 171	10,301
10.	Bassesang tempe	14,373	6, 456	6,902	6,996
11.	Latimojong	5.558	5, 625	55, 20	5, 549
12.	Bassesang tempe utara		8,074	82,33	8,307
13.	Bupon	14,716	14, 918	14,256	14, 342
14.	Ponrang	26,595	26,985	26, 758	26, 931
15.	Ponrang selatan	24,185	24, 538	24,222	24,368
16.	Bua	31,527	32,011	33,969	34,424
17.	Walentrang	17,754	18.041	18,641	18,842
18.	Walentrang Timur	15, 564	15.807	15,100	15, 263
19.	Lamasi	20,738	21.051	20, 553	20, 667
20.	Walengrang Utara	18.071	18.356	18,014	18,114
21.	Walentrang barat	9,059	9.143	9, 299	9,377
22.	Lamasi timur	12,389	12,569	12,200	12,268

Sumber : kabupaten Luwu dalam Angka Tahun 2012

6. Persebaran dan kepadatan penduduk

Jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya tersebar tidak merata di berbagai kecamatan di kabupaten Luwu, Tahun 2011 jumlah penduduk tersebar terdapat di kecamatan Bua yaitu, sebesar 9,31 persen dan jumlah penduduk terkecil terdapat di kecamatan Latimojong sekitar 1,64 persen penduduk. Sementara jika dilihat dari kepadatan penduduk per km², kecamatan Lamasi merupakan daerah terdapat yaitu 487,42 penduduk perkilo meter persegi (km²) dengan luas wilayah hanya 1,4 persen dari luas kabupaten Luwu,

sementara yang paling rendah kepadatannya terdapat di kecamatan latimojong yaitu 11, 78 penduduk perkilometer persegi (km²) dengan luas wilayah 15,6 persen dari luas kabupaten Luwu.

BAB V

IMPLEMENTASI STRATEGI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN LUWU

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu

Implementasi merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Selain itu juga merupakan satu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu sprogram yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bersamaan pihak dinas untuk mencapai tujuan agar pelayanan retribusi pasar dapat tercapai di Kabupaten Luwu DISDAG bersama jajarannya melakukan strategi fungsional manajemen berupa perencanaan, pengawasan, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi kerja, dan integritas serta pelaksanaan kerja. Pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah di buat oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjan serta hambatan atau kendala yang dihadapi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Hal tersebut perlu di ketahui agar pelaksanaan kebijakan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan target yang telah di tentukan dapat terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan hasil wawancara yang tentunya terkait dengan rumusan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Wahida (48 Tahun) yaitu sebagai kepala Dinas Perdagangan (Disdag) mengatakan bahwa:

“Kami adalah pelaksana dari kebijakan ini serta mengelola pasar itu sendiri di wilayah I yang memiliki struktur tersendiri namun tetap mengacu pada juknis yang telah diberikan agar berjalan sesuai dengan apa yang kami harap.” (wawancara Senin tanggal 27 Agustus 2018).

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan informan ibu Darni (37 Tahun) selaku bendahara Dinas Perdagangan (DISDAG) mengatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar Belopa dari pihak DISDAG Kabupaten Luwu dan pengelola pasar yang terdiri dari kepala pasar dan kolektor penagih yang telah di SK kan oleh Bupati Kabupaten Luwu. Merekalah yang akan terjun langsung kelapangan sebagai bentuk tanggun jawab dan pengawasan terhadap jalannya retribusi pasar tersebut” (wawancara Senin tanggal 27 Agustus 2018).

Demikian juga hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Hamsah T (39 Tahu) sebagai kepala pasar yang mengatakan bahwa:

”Dalam pengelolaan pasar khususnya pasar Belopa, kami di berikan mandat dari Bapak Bupati Kabupaten Luwu, untuk mengelola pasar sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku dan hasilnya akan kami lapor kepada Dinas Perdagangan (Disdag) untuk ditindak lanjuti.” (wawancara Selasa 04 September 2018).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Wahida, Bapak Hamsah T dan Ibu Darni. peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kepala dinas perdagangan (DISDAG) Kabupaten Luwu terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di pasar Belopa yang berada di UPTD pengelola pasar wilayah 1. selain dari DISDAG ada beberapa pihak lain yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar yaitu Kepala Pasar, kolektor penagih yang terjun langsung kelapangan sebagai bentuk tanggung jawab dan pengawasan terhadap jalannya retribusi pasar Belopa dan Kepala Pasar juga telah diberi mandat untuk mengelola pasar Belopa sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku dan hasilnya akan Kepala Pasar laporkan kepada Kepala Dinas Perdagangan selaku kepala UPTD pengelola pasar wilayah 1.

2. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu.

Fasilitas yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk para pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui ada atau tidaknya fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Luwu.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Pasar Belopa Bapak Hamsah T (39 Tahun) mengatakan bahwa:

“Adapun fasilitas yang dibutuhkan dalam pemungutan retribusi pasar hanya karcis yang di serahkan kepada pedagang dan merupakan bukti

pembayaran retribusi. Karcis itulah ntinya yang akan menjadi bukti bahwa para pedagang diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. (wawancara Kamis 06 September 2018).

Hal serupa di ungkapkan oleh kolektor retribusi Bapak Martinus (40 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar belopa memiliki fasilitas berupa karcis, retribusi yang berasal dari Kabupaten yang kemudian di bagikan kepada para pedagang, sehingga pedagang wajib membayar retribusi saat ini juga”. (wawancara Kamis 06 September 2018).

Sedangkan menurut salah pedangang Ibu Nuriati (41 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Kami senangtiasa di berikan karcis untuk membayar biaya retribusi dan itu diberikan pada hari pasar melalui penagih retribusi” (wawancara Kamis 06 September 2018)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hamsah T, Bapak Martinus dan Nuriati dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang ada dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di kabupaten luwu sudah di tentukan oleh pemerintah, berupa pemungutan retribusi pasar Belopa di Kabupaten Luwu berupa karcis yang di bagikan kepada para pedagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pedagang wajib membayar retribusi kepada daerah sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pendapatan daerah.

B. Pembahasan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, Kantor pengelolaan pasar (KPP) menetapkan beberapa petugas pemungut retribusi. Beberapa petugas pemungut retribusi tersebut di kepalahi oleh seorang kepala pasar yang di tempatkan di setiap pasar. Seorang kepala pasar bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir setiap retribusi yang di pungut oleh petugas retribusi. Kepala pasar mempunyai wewenang penuh terhadap pasar yang di kelolanya sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi. Pembinaan ini di lakukan karena ada beberapa pedagang yang seenaknya melanggar aturan yang berlaku.

Pengawasan penarikan retribusi oleh kepala pasar sangat penting dilakukan supaya petugas retribusi tidak sewenang-wenang dalam memungut retribusi kepada pedagang. Retribusi pasar yang ditarik dari setiap pedagang karena pedagang yang melakukan usaha berdagang di pasar menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat dipasar. Adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki pasar adalah terdiri dari kantor pasar, loket pasar, tanah, los, kios, musholla, air, listrik, bak sampah, parkir lokasi, dan saluran air. Penetapan tarif retribusi pasar di dasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya menyediakan rasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Selain beberapa hal tersebut diatas maka penetapan tariff retribusi juga di dasarkan pada kebijakan pemerintah daerah. Pengurusan pengelolaan dan pembinaan pasar itu dikelola dan dibina oleh pemerintah daerah melalui kepala pasar yang ditugaskan disetiap pasar sedangkan pasar desa diurus dan dikelola oleh pemerintah desa yang bersangkutan dan di bina oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan-pelaksanaan pasar

pemerintah ditunjuk oleh kepala kantor pengelolaan pasar dan salah satu diantaranya ditetapkan sebagai kepala pasar. Kepala pasar pemerintah disipin mengurus dan mengelola pasar, pemerintah juga mengelola pasar desa diwilayahnya dalam hal tertip administrasinya, kepala pasar bertanggung jawab kepada kepala kantor pengelola pasar. Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh kepala pasar, tetapi juga sering dilakukan oleh seksi keamanan dan seksi ketertiban. Pembinaan yang dilakukan adalah tentang tat ruang pasar supaya suasana pasar tidak terkesan berantakan sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi.

Adapun fasilitas yang digunakan dalam pemungutan retribusi pasar hanya menggunakan karcis yang diserahkan kepada pedagan dan merupakan bukti pembayaran retribusi agar pedagan menyadari bahwa retribusi adalah kewajiban dari tenda setempat.

C. Kesesuaian Teori dengan Hasil Penelitian

Teori Administrasi publik menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah.

Administrasi pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah

otonom (propinsi, kabupaten dan kota). Sementara itu otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dasar pemikirannya adalah penyelenggaraan pemerintah daerah disesuaikan dengan amanat undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Dari pemaparan teori diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara teori atministrasi publik dengan implementasi strategi kebijakan retribusi pasar di kabupaten luwu adalah pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang dilakukan melalui pemungutan retribusi pasrar sebagai sumber pendapatan daerah yang memiliki fungsi untuk meningkatkan stabilitas pelayanan pasar yang berupa fasilitas-fasilatas berupa

kantor pasar, loket pasar, tanah, los, kios, musholla, air, listrik, bak sampah, parkir lokasi, dan saluran air. Dengan menerapkan strategi Retribusi pasar yang ditarik dari setiap pedagang karena pedagang yang melakukan usaha berdagang di pasar menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat dipasar.

BAB VI

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN LUWU

A. Hasil Penelitian

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerja dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan, dan peraturan implementasi harus di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer kebijakan pemungutan retribusi pasar tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan di terapkan dalam wajib retribusi. Terdapat tiga indicator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a. Transmisi (proses penyampaian informasi)

Proses penyampaian informasi yang di maksud adalah bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana. Hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik bula. Sering kali yang terjadi dalam

penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian antara pembuat kebijakan dengan implementernya.

Pemerintah Kabupaten Luwu yang membuat kebijakan retribusi pasar dan juga menyampaikan informasi kebijakan tersebut melalui dua cara yaitu dengan lisan dan tertulis. Informasi berupa lisan yang di maksud adalah berupa pertemuan dengan tim dari pemerintah Kabupaten Luwu dengan pejabat serta staf dari pengelola pasar dari setiap wilayah yang ada di Kabupaten Luwu.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hamsah T (39 Tahun) sebagai Kepala Pasar Belopa mengatakan bahwa:

“Penyampaian informasi dilakukan dengan cara memanggil para ketua-ketua Kepala Kelompok pedagan untuk menyampaikan informasi kebijakan itu kemudian dijelaskan mengenai aturan yang ada, target yang akan dicapai dan lain sebagainya.” (wawancara minggu 09 September 2018).

b. Kejelasan informasi

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalahpahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan tersebut. Informasi tentang pemungutan retribusi pasar yang di sampaikan melalui lisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsah T (39 Tahun) sebagai Kepala Pasar Belopa mengatakan bahwa:

“informasi yang diterima semuanya sudah jelas karena semua itu ada drafnya, baik itu jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pedagang los kios dan pelataran.”(wawancara Minggu 09 September 2018).

Hasil wawancara dengan Ibu Syamsiah (50 Tahun) salah seorang pedagang mengatakan bahwa:

“Disdag Kabupaten Luwu dan pengelola pasar sering memberikan informasi-informasi penting terkait dengan masalah pemungutan retribusi, melalui forum pedagang, dan melalui surat edaran”
(wawancara Minggu 09 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsah T, dan Ibu Syamsiah dapat disimpulkan bahwa informasi yang diterima dari pembuat kebijakan kepelaksana kebijakan dan yang menerima kebijakan tersebut sudah sangat jelas karena selain penyampaian melalui tim juga semua ketentuan untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Luwu No. 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

2. Sumber Daya

Dalam suatu kebijakan bisa saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya factor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf

yang cukup, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada pasar yang ada di Kabupaten Luwu. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

a. Staf yang cukup

Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya. Dalam hal pemungutan retribusi pasar sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi retribusi PAD dinas pengelolaan keuangan daerah Bapak Ahmad Abdul Razak (38 Tahun) mengatakan bahwa:

“staf yang ada sekarang sudah cukup, karena masing-masing UPTD mengelola pasar sudah memiliki struktur tersendiri dan itulah nantinya yang akan mengawasi dan mendampingi pelaksanaan kebijakan ini akan berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Masing-masing UPTD pengelola pasar akan memberikan laporan kepada DPKDK Kabupaten Luwu atas kinerja dilapangan, selain itu mereka juga mempunyai staf yang cukup baik untuk diterjunkan kelapangan sebagai bentuk

pelaksanaan dari kebijakan itu, terutama para penagih retribusi.”

(wawancara Selasa 11 September 2018).

Sedangkan menurut salah satu pedagang dengan Bapak sakkir (37 Tahun) mengatakan bahwa:

“petugas yang datang untuk menagih sudah cukup baik karena mereka datang sangat bersahabat sekali, sehingga kami tidak merasa takut akan tagihan untuk retribusi itu”(wawancara Selasa 11 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Abdul Razak dan Bapak Sakkir dapat disimpulkan bahwa dengan demikian staf yang ada dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup baik karena peranan staf yang begitu besar dan bisa diterima dengan baik oleh para pedagang sehingga tidak menemui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk kepentingan bersama.

b. Informasi yang dibutuhkan

Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai bagaimana melaksanakan atau menjalankan sebuah kebijakan. Informasi-informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pasar sudah sangat jelas didalam peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Informasi yang diterima oleh implementer mengenai pelaksanaan suatu program harus akurat, mulai dari objek dan subjek retribusi tarif retribusi sampai pada pelaksanaannya serta ketaatan personil-personil dalam menjalankan tugas masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Abu Bakar (50 Tahun) sebagai kolektor mengatakan bahwa:

“Kami menjalankan tugas dalam pemungutan retribusi sesuai dengan apa yang sudah diatur jadi saya pikir semua itu sudah jelas dan semua itu mengacu pada perda yang ada, sehingga para pelaku ekonomi dalam hal ini pedagang harus mematuhi ketentuan yang ada, sehingga target yang kami rencanakan bisa terealisasi dengan baik.”(wawancara Selasa 11 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Abu Bakar (50 Tahun) dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten Luwu terutama pada pasar Belopa sudah sangat jelas, begitu pula personil-personil yang terlibat di dalamnya harus melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan sehingga pelaksanaan kebijakan dalam pemungutan retribusi pasar berjalan dengan efektif.

B. Pembahasan

Hasil implementasi kebijakan dilihat dari aspek komunikasi sumber daya struktur birokrasi dan disposisi pelayanan yang sudah dilakukan. Komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi antar pimpinan, pegawai dan para pelaku pasar

yaitu pedagang sudah berjalan dengan baik. Informasi tentang kebijakan retribusi pasar diberitahukan secara jelas dari pimpinan kepada pedagang setempat lewat para petugas pasar yang menangih retribusi.

Sumber daya menunjukkan bahwa jumlah pegawai pelaksana kebijakan retribusi pasar sudah cukup memadai dibandingkan beban kerja yang ada. Disposisi menunjukkan bahwa untuk kebijakan retribusi pelayanan pasar semua unsur/komponen baik pemimpin maupun pegawai mendukung sepenuhnya terhadap implementasi kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu. Struktur birokrasi menunjukkan bahwa untuk struktur organisasi sudah tertata dengan baik dan jelas. Untuk standard operasional prosedur telah tersedia dan dipahami oleh para petugas pelaksana karena telah di jalankan lewat pekerjaan sehari-hari oleh para petugas/pegawai pelaksana.

Dalam penerapan implementasi retribusi pasar pemerintah akan terus berupaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar kedepannya agar bisa mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Besarnya tarif retribusi pasar yang dipungut bagi pemakai tempat-tempat dalam pasar Belopa dilihat dari aspek: komunikasi (antara penyelenggara kebijakan dan kelompok sasaran), sumber daya (ketersediaan dan ketercakupan SDM dan sumber daya pinancial), disposisi (kesedian dan komitmen pelaksana kebijakan), struktur birokrasi (mekanisme dan struktur organisasi pelaksanaan/pembagian tugas dan tanggung jawab).

c. Kesesuaian teori dengan hasil penelitian

Teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Teori ini sering disebut juga perspektif fungsionalisme, dicetuskan oleh Emile Durkheim. Durkheim banyak mengkaji tentang tatanan sosial dan bagaimana masyarakat dapat hidup harmonis. Fungsionalisme fokus pada struktur sosial yang levelnya makro. Beberapa tokoh sosiologi yang terpengaruh oleh teori fungsionalisme Durkheim diantaranya, Talcott Parsons dan Robert K. Merton.

Fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial. Masyarakat, dengan demikian adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Durkheim sendiri melihat masyarakat sebagaimana organisme. Organisme tersusun atas beberapa komponen yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi. Teori struktural fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya.

Dari pemaparan teori diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara teori struktural fungsional dengan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di kabupaten luwu adalah Fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial. Masyarakat, dengan demikian adalah kumpulan dari

individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial, pendapat tersebut sejalan dengan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar dikabupaten luwu untuk menjaga stabilitas pasar dengan menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”. Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di kabupaten Luwu adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi yang bermuara kepada terciptanya tatanan dan stabilitas sosial.

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

A. simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam pembahasan bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi strategi kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang dilakukan melalui pemungutan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan daerah yang memiliki fungsi untuk meningkatkan stabilitas pelayanan pasar yang berupa fasilitas-fasilitas berupa kantor pasar, loket pasar, tanah, los, kios, mushollah, air, listrik, bak sampah, parkir lokasi, dan saluran air. Dengan menerapkan strategi retribusi pasar yang di tarik dari setiap pedagang karena pedagang yang melakukan usaha berdagang di pasar menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat dipasar.
2. Pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu adalah fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial masyarakat, dengan demikian adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk

menjaga stabilitas sosial, pendapat tersebut sejalan dengan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu untuk menjaga stabilitas pasar dengan menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi". Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Luwu adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertip disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya dalam membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi yang bermuara kepada terciptanya yang bermuara kepada terciptanya stabilitas sosial.

B. Saran

Saya harap penelitian selanjutnya dapat menambah wawasan dan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu semoga penelitian ini menjadi langkah awal dan menjadi acuan agar kedepannya peneliti-peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini jika Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu yang terjadi sekarang belum mampu peneliti tuntaskan, paling tidak usaha bersama untuk meningkatkan nilai HAM dan nilai-nilai sosial lainnya dapat terealisasikan dengan baik.

PEDOMAN OBSERVASI

Lampiran 1

Tanggal Observasi :

Tempat :

No.	Aspek yang diamati	Keterangan
1.	Lokasi Observasi	
2.	Siapa sajakah yang terlibat dalam pemungutan retribusi pasar.	
3.	Apa saja fasilitas yang digunakan dalam pemungutan retribusi pasar	
4.	Bagaimanakah cara anda melakukan pemungutan retribusi	

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 2

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Daftar Pertanyaan.

I. Implementasi strategi kebijakan retribusi pasar di kabupaten luwu

1. Bagaimana strategi mengimplementasikan kebijakan retribusi pasar/
2. Siapa sajakah yang terlibat dalam pemungutan retribusi pasar?
3. Bagaimana cara bapak dalam mengelola pasar?

II. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di kabupaten luwu

1. Apa saja fasilitas yang digunakan dalam pemungutan retribusi pasar?
2. Apa yang diberikan kepada ibu saat dimintai membayar retribusi?
3. Bagaimanakah cara anda melakukan pemungutan retribusi?

DOKUMENTASI PENELITIAN SKRIPSI DI PASAR SENTRAL BELOPA
KABUPATEN LUWU



Gambar 1 : wawancara dengan Kepala Pasar



Gambar 2: wawancara dengan kolektor Pasar Luwu



Gambar 3: wawancara dengan Pedagang Pasar Luwu



Gambar 4: salah satu karcis Pasar Luwu

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Prakosa. Kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. UII Press. Yogyakarta.

Bungin Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Media Group

Chandler. Ralph C. and Plano. Jack C. 2008. *The Public Administration Dictionary*. California: ABC-Clio inc.

Erly Suandy. 2002. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Fayol. Henry. *Industri dan Menejemen Umum*. Terj. Winardi. London: Sir Issac and Son 1841

Pasolong. Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta Alfabeta.

Soekanto Soerjono. 2012. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta UI Press

Sugiyanto. 2008. *Model-model Pembelajaran Kooperatif*. Surakarta : Depdikbud

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. Dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Syarbaini, Syarial dan Rosdianta. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

W.J.S, Poerwadarminta. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Internet:

<http://Luwukab.go.id/2016/10/26>

<https://Luwukab.bps.go.id/2018/12/04/statitable.html>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu



RIWAYAT HIDUP

Isma Bakri, Lahir Lamunre, pada tanggal 28 Desember 1995. Anak kedua dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Bakri dan Kasmawati. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 34 Pacone dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Balopa , lulus pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Unggulan Kamandre dan tamat di tahun 2014. Dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Sosiologi dan berhasil Lulus di Program Strata 1 (S1) Kependidikan dan menyelesaikan gelar studi pada tahun 2019 dengan gelar sarjana pendidikan.